

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. KAJIAN PUSTAKA

##### 1. Pluralisme

###### a. Pengertian pluralisme

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak (jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralism adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.<sup>1</sup>

Dalam perspektif ilmu sosial, pluralism yang meniscayakan adanya diversitas dalam masyarakat memiliki dua “wajah”, konsesus dan konflik. Consensus mengandaikan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu akan survive (bertahan hidup) karena para anggotanya menyepakati hal-hal tertentu sebagai aturan bersama yang harus ditaati, sedangkan teori konflik justru memandang sebaliknya bahwa masyarakat yang berbeda-beda itu akan bertahan hidup karena adanya konflik. Teori ini tidak menafikkan adanya keharmonisan dalam masyarakat. Keharmonisan terjadi bukan

---

<sup>1</sup> Pius A. P, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arkola, 1994), Cct. Ke-1, H.604.

karena adanya kesepakatan bersama, tetapi karena adanya pemaksaan kelompok kuat terhadap yang lemah.<sup>2</sup>

Pluralitas merupakan realitas sosiologi yang mana dalam kenyataannya masyarakat memang plural. Plural pada intinya menunjukkan lebih dari satu dan isme adalah sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian pluralisme adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal diantaranya sosial, budaya, politik dan agama.<sup>3</sup>

Pluralisme agama bisa dipahami dalam tiga sudut pandang. Pertama, sosial yaitu” semua agama berhak untuk ada dan hidup” artinya semua umat beragama sama-sama belajar untuk toleran, dan menghormati iman atau kepercayaan dari setiap penganut agama. Kedua, etika atau moral yaitu “ semua umat beragama memandang bahwa moral atau etika dari masing-masing agama bersifat relative dan sah” apabila umat beragama menganut pluralisme agama dalam nuansa atis, maka didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain. Ketiga teologi filosofis yaitu “ agama-agama pada hakekatnya setara, sama-sama benar dan sama menyelamatkan” artinya semua agama menuju pada ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, yang dimaksud “pluralism

---

<sup>2</sup> Umi Sumbulah, Islam “ Radikal” Dan Pluralism Agama, (Malang: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010),

<sup>3</sup> Mabadiul Chomsah, “Pluralism Dalam Perspektif Islam”, Dalam [Http://Penabutu.Com](http://Penabutu.Com) (30 Desember 2012).

agama” adalah suatu pemahaman bahwa semua agama mempunyai eksistensi hidup saling berdampingan, saling bekerjasama dan saling berinteraksi antara satu agama dengan agama yang lain. Atau disebut juga suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara keadaan yang bersifat plurar baik itu suku, etnis maupun agama.

Kemudian dalam ilmu politik melahirkan ilmu tentang kedaulatan, pertama paham teokrasi yakni kedaulatan ditangan Tuhan, kedua paham demokrasi yakni bahwa kedaulatan ditangan masyarakat atau rakyat, ketiga paham teo-demokrasi teori ini dikemukakan oleh Abdul A’la, teori ini ingin menggabungkan teori di atas. Artinya meskipun pengelolaan di negara adalah ditangan rakyat, namun rakyat tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan.<sup>4</sup> Dan konsekuensi lebih lanjut dari cara pandang adalah bahwa sumber legitimasi, referensi dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan universal harus menjadi dasar prinsip bagi seluruh cara pandang pikiran, konsep, interpretasi, tafsir , perjuangan, kerja dan semua aktifitas manusia didunia.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat plural yang ditengarai dengan kehadiran bersama perbedaan dan keragaman, kebebasan beragama atau

---

<sup>4</sup> Abd A’LA DKK Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam, Juni 2005, Pustaka Nuansa, Bandung, Hal 79

<sup>5</sup> Husaen Muhammad, Bandung, Putaka Nuansa. 2011

berkepercayaan dapat didefinisikan meliputi dua kategori sebagai berikut:

- a) Kebebasan beragama : perbedaan dan keragaman agama-agama yang hidup bersama dan berdampingan tercakup dalam definisi kebebasan beragama. Agama-agama tersebut diperkenankan untuk dipeluk dan diyakini secara bebas oleh setiap individu yang memilihnya menjadi pegangan hidup.
- b) Kebebasan berkepercayaan : merupakan istilah yang merujuk kepada pandangan hidup-pandangan hidup atau posisi non keagamaan atau sekuler yang tercakup dalam kebebasan berkepercayaan.<sup>6</sup>

Sebagai bangsa yang plural dan multi kultural, keberislaman seseorang tidak cukup hanya melihat segala persoalan kehidupan dari perspektif individu dan teologis. Kehidupan masyarakat yang beragam suku, agama maupun etnis akan mengalami keharmonisan dan damai jika setiap individu menghargai entitas apapun yang dimiliki orang lain. Proses penghargaan ini akan nyata tidak lain agar keberagaman yang diyakini tidak sampai pada terjadinya titik klimaks klaim kebenaran dari orang lain dan selanjutnya berujung pada usahanya selalu menang sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zakiyudin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, (Jakarta: PSAP, 2006)., Hal 3.

<sup>7</sup> Wasid, *Gus Dur Sang Guru Bangsa; Pergolakan Islam, Kemanusiaan Dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Interpena, 2010)., Hal 116.

Dalam masyarakat yang beragam budaya, suku dan agama keharusan mengedepankan kesamaan adalah sebuah keniscayaan dari pada selalu mencari perbedaan. Modal ini cukup efektif sehingga nilai-nilai budaya dan agama ditempatkan dalam posisinya sebagai motivasi bagi upaya membangun sebuah pluralitas dan multikultural yang merupakan asset bangsa.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip pluralisme dianggap dapat menjawab permasalahan dalam melawan keterasingan jiwa masyarakat modern karena tekanan kapitalisme. Dengan demikian, ide pluralisme berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Berangkat dari pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa pluralism merupakan suatu pandangan yang meyakini akan banyak dan beragamnya hakikat realitas kehidupan, termasuk realitas keberagaman manusia. Sehingga pluralisme agama dapat diartikan sebagai sikap dan pandangan bahwa hakikat agama di dunia ini tidak hanya satu, tetapi banyak atau beragam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, 123.

<sup>9</sup> Umi Sumbulah, Islam “Radikal” Dan Pluralisme Agama, (Malang: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010),.Hal 47.

## 2. Kerukunan Antar Umat Beragama

### a. Pengertian kerukunan antar umat beragama

Secara sederhana dapat diartikan bahwa pengertian kerukunan ialah perihal hidup rukun, keragaman, kesepakatan dan perasaan rukun.<sup>10</sup>

Kerukunan berarti kondisi hidup yang jauh dari permusuhan, perselisihan, persengketaan serta saling membantu, saling menghormati dan saling kerja sama.

Kerukunan merupakan sepakat dalam perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk mencari dan membina saling pengertian yang tulus ikhlas.<sup>11</sup>

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan budayanya dengan setidaknya Lima teori dasar

a) Teori Nilai: kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling mentaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat. Kasus: bagaimana jika nilai-nilai dalam masyarakat tertentu mengajarkan kekerasan/konflik

---

<sup>10</sup> Proyek pembinaan kerukunan hidup beragama departemen agama, kerjasama sosial kemasyarakatan, (jakarta: PPKHB, 2011 ), 2.

<sup>11</sup> Ibid., 3.

- b) Teori struktural: kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi dibawah tekanan. Dianut orde baru
- c) Teori idealis: kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan. Kasus: Bagaimana peran ideologi pancasila atau ideologi yang bersumber dari agama dalam realita konflik di Indonesia?
- d) Teori resiprositas: kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap. Islam = halal bi halal, idul fitri. Kristen = pemberian hadiah natal dll. Berkaitan dengan teori resiprositas sosial Turner mengajukan pokok teori pertukaran: Manusia selalu mencari keuntungan dalam transaksi sosial Dalam transaksi sosial manusia memperhitungkan untung rugi Kesadaran atas alternatif bagi dirinya Adanya persaingan Relasi pertukaran berlangsung dalam semua konteks sosial bahkan dalam komoditas tak berwujud misalnya perasaan dan jasa.
- e) Teori interaksi: kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antar kelompok, etnis, agama dll dalam

masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

**b. Faktor-faktor kerukunan**

Dalam Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan mengenai karakter masyarakat yang adil dan beradab adalah:

- a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
- e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Hal 11.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia.
2. Umat beragama adalah pemeluk agama.
3. Kerukunan Umat Beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penodaan Agama adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
5. Pendidikan Agama adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mendidik peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

6. Penyiaran Agama adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran sesuatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan.
7. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
8. Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran agama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadat atau kebaktian khusus.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara <sup>13</sup>

## **B. KERANGKA TEORITIK**

Ada dua tema besar karya Emile Durkhem, adalah prioritas hal yang sosial di atas individual, dan kedua adalah ide masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah karena kedua tema tersebut harus bersifat kontrofesional, Durkhem masih relevan sampai saat ini.

Kita hidup di dalam masyarakat yang melihat segala sesuatu sebagai hal yang dapat dikaitkan dengan para individu, bahkan masalah-masalah yang jelas-jelas sosial seperti resisme, polusi dan resisme ekonomi. Durkhem mendekati dari berbagai hal yang bertentangan, yang menekan dimensi sosial semua fenomena manusi. Akan tetapi, bahkan seseorang yang mengakui pentingnya masyarakat sebagai entitas tidak dapat dipahami secara langsung tanpa mempelajari secara ilmiah.

### **1. Fakta-Fakta Sosial**

Untuk membantu sosiologi menjauh dari filsafat ada untuk memberikan suatu identitas yang jelas dan terpisah, Durkhem (1895) mengusulkan agar pokok masalah sosiologi yang khas khususnya ialah mempelajari fakta-fakta sosial, (lihat M. Gane 1988). Ringkasnya, fakta-fakta sosial adalah struktur-struktur sosial dan norma-norma

---

<sup>13</sup> UU.KUB.TIMJA .1 agustus 2011

dan nilai-nilai kultural yang eksternal bagi, dan bersifat memaksa kepada para aktor. Hal yang penting di dalam sosiologi pemisahan dari filsafat adalah bahwa fakta sosial diperlakukan sebagai “ benda-benda” (S, Jones 1996) dan dipelajari secara empiris. Hal itu berarti bahwa kita mempelajari hal-hal dari luar pikiran-pikiran kita sendiri melalui pengamatan dan eksperimen.

Akhirnya, perubahan di dalam prosès hanya akan dapat dipelajari oleh fakta-fakta sosial yang lain dan tidak dapat selain seseorang individu. Sekalipun di dalam contoh-contoh yang jarang ada ketika perubahan dibidang bahasa dapat dilacak pada pelaku individu, penjelasan yang aktual untuk perubahan itulah fakta-fakta sosial yang telah membuat masyarakat terbuka dengan perubahan itu, contohnya, sebagian besar bahasa yang dapat diubah adalah bahasa jargon. Yang nyaris selalu berasal dari bahasa kelompok marjinal.

Beberapa sosiolog merasa bahwa Durkheim mengambil suatu pendirian yang ekstrim( Karady 1987) dalam membatasi studi fakta-fakta sosial. Pendirian itu telah membatasi beberapa cabang-cabang sosiologi hingga sampai saat ini. Selanjutnya, Durkheim tanpa dibuat-buat memutus sosiologi dari yang berdekatan. Seperti yang dinyatakan (Lemet1994) karena dia mendefinisikan sosiologi secara eksklusif sehubungan dengan fakta-faktanya sendiri. Namun demikian apapunitu Durkheim membangun ide-ide fakta sosial sebagai ilmu independen dan memberikan salah satu argumen-argumen yang paling

menyakinkan untuk mempelajari masyarakat apa adanya sebelum kita memutuskan apa itu seharusnya.<sup>14</sup>

a. Moralitas

Durkhem adalah sosiolog moralitas didalam arti yang sangat luas kata itu, (R.T, Hall 1988) mengingatkan kita pada moralitas sebagai fondasi sosiologi disiplin. Pandangan Durkhem mengenai moralitas mempunyai dua aspek. Pertama, moralitas adalah suatu fakta sosial, dengan kata lain, baha moralitas dapat dipelajari secara empiris, eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Hal itu berarti moralitas tidak dapat dipelajari dengan filsafati oleh orang, tetapi dipelajari sebagai sesuatu fenomena yang empiris. Hal itu benar karena moralitas berhubungan dengan struktur sosial. Untuk memahami suatu moralitas suatu lembaga tertentu, anda harus mempelajari suatu lembaga itu dibentuk cara ia menerima bentuknya yang sekarang, bagaimana keseluruhan strukturnya di dalam sebuah masyarakat. Bagaimana keseluruhan kelembagaan dihubungkan dengan kebaikan sosial.

Kedua, Durkhem adalah seorang sosiolog karena studinya didorong oleh moralitas “kesehatan” moral masyarakat modern. Sungguh banyak produk Durkhem dilihat sebagai sampingan perhatiannya terhadap isu-isu moral. Poin kedua tersebut

---

<sup>14</sup> George ritzer .teori sosiologi .2012.yogjakarta.pustaka pelajar

membutuhkan penjelasan yang sangat luas, Durkheim tidak menganggap bahwa masyarakat telah terjadi atau sedang terancam, tidak bermoral, hal itu benar-benar mustahil karena moralitas.<sup>15</sup>

b. Nurani kolektif

Beberapa poin patut digaris bawahi dalam definisi tersebut. Pertama, jelas bahwa Durkheim menganggap nurani kolektif sebagai hal yang terjadi didalam seluruh masyarakat tertentu, ketika dia menulis “totalitas” kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen masyarakat. Kedua, Durkheim membayangkan dengan jelas nurani kolektif sebagai yang independen dan mampu menentukan fakta-fakta sosial yang lain. Ia bukan sekedar pantulan dari basis material seperti yang terkadang dianjurkan Marx. Akhirnya dia sebagai penganut pandangan nurani kolektif yang demikian, Durkheim juga menulis “kesadaran atasnya” muali kesadaran individual.

Nurani kolektif mengacu pada struktur umum pengertian-pengertian, norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan yang diyakini bersama. Oleh karena itu, nurani kolektif adalah suatu konsep yang serba mencakup dan tidak berbentuk. Seperti yang akan kita lihat, Durkheim menggunakan konsep itu membentuk masyarakat-masyarakat ‘primitif’ mempunyai nurani kolektif yang lebih kuat, yakni pengertian-pengertian, norma-norma,

---

<sup>15</sup> Ibid., 137.

kepercayaan-kepercayaan diyakini dengan kuat daripada masyarakat modern.<sup>16</sup>

c. Representasi kolektif

Karena nurani kolektif adalah sebuah ide yang sangat begitu luas dan tidak berbentuk mustahil mempelajari secara langsung dan harus mendekatinya melalui fakta-fakta sosial material yang terikat, contohnya ( kita akan melihat nurani kolektif oleh Durkhem) ketidakpusan Durkhem tersebut menyebabkan dirinya tidak begitu banyak menggunakan nurani kolektif di dalam karyanya yang belakangan karena menyukai konsep yang jauh lebih spesifik yakni *representasi kolektif* ( Nemedi 1995) Durkhem menggunakan istilah itu untuk mengacu baik kepada suatu konsep kolektif maupun kekuatan sosial. Contohnya simbol-simbol agamis, mitos-mitos, dan legenda-legenda. Semua itu adalah car-cara masyarakat mencerminkan sendiri. Mereka menggambarkan kepercayaannya, norma-norma dan nilai kolektif, dan mereka mendorong kita untuk menyesuaikan klim klim itu.

Representasi kolektif juga tidak dapat menjadi para individu karena mereka muncul dari interaksi sosial. Tetapi mereka dapat dipelajari secara lebih langsung daripada nurani kolektif karena mereka lebih mungkin untuk dihubungkan dengan simbol-simbol material seperti bendera dan lain-lain. Oleh karena itu sang

---

<sup>16</sup> Ibid., 138.

sosiolog dapat mulai mempelajari bagaimana representasi-representasi tertentu sangat cocok, atau mempunyai pertalian, representasi-representasi kolektif lainnya tidak. Sebagai contoh, kita dapat melihat studi sosiologi yang menunjukkan bagaimana representasi-representasi Abraham Lincoln berubah dalam menanggapi fakta-fakta sosial lainnya.<sup>17</sup>

d. Arus sosial

Sebagain besar fakta-fakta sosial yang diacu Durkhem adalah yang berkaitan dengan organisasi-organisasi sosial. Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa ada fakta-fakta sosial yang tidak menggambarkan dirinya di dalam bentuk yang sudah dikristalisasi ini” (1895) Durkhem menyebut itu sebagai arus-arus sosial. Dia memberi contoh “gelombang-gelombang besar semangat, kasihan, amarah” yang dihasilkan terhadap pergaulan. Meskipun arus-arus sosial kurang daripada fakta-fakta sosial, namun merupakan fakta-fakta sosial karena tidak dapat direduksi menjadi individu. Kita dibawa oleh serta arus sosial itu dan arus itu mempunyai suatu daya memaksa kepada kita meskipun kita baru menyadarinya bila kita berjuang melawan perasaan-perasaan bersama.

Fakta-fakta sosial nonmaterial yang berlangsung saat itu mungkin saja mempengaruhi lembaga-lembaga yang paling kuat, arus sosial dapat dipandang sebagai sekumpulan makna yang

---

<sup>17</sup> Ibid., 139.

dianut bersama oleh para anggota suatu kolektifitas. Dalam dirinya sendiri, arus sosial dapat dijelaskan dari pikiran seorang individu manapun. Para individu tentu saja menyumbang kepada arus-arus sosial, tetapi dengan menjadi sosialsesuatu berkembang melalui interaksi-interaksinya. Arus-arus sosial hanya dapat dijelaskan secara iner subjektif, yakni, dari interaksi-interksi dari pada individu. Arus sosial ada pada level interaksi bukan ada pada level individu” suasana hati” kolektif tersebut atau arus-arus sosial, bervariasi dari kolektifitas yang satu kepada yang lainnya, dengan hasil bahwa ada suatu variasi di dalam tingkat perilaku tetentu.<sup>18</sup>

e. Solidaritas

Fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat adanya cara bertindak manusia yang umumnya terdapat pada masyarakat tertentu yang sekaligus memiliki eksistensinya sendiri, dengan cara dan dunianya sendiri terlepas dari manifestasi-manifestasi individu,<sup>19</sup> contoh yang paling sederhana adalah adanya norma-norma yang ada di yang menggiring masyarakat untuk berubah. Berangkat dari Fakta Sosial mengenai perubahan. Dia

---

<sup>18</sup> Ibid., hal 144.

<sup>19</sup> James M. Henselin. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi. (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 2006),. Hal.

menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dengan tatanan yang ada di masyarakat

Menurut Durkheim, perubahan yang terjadi adalah karena adanya solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja sehingga pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern karena merupakan kewajiban moral. Ia menunjukkan pembagian kerja tersebut sebagai salah satu sumber terpenting dalam solidaritas karena pada dasarnya manusia hidup yang saling bergantung sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan masyarakat.<sup>20</sup>

Solidaritas sosial menurut Emile Durkheim harus menjadi objek utama dalam menjelaskan realitas sosial. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan kepadatan moral yang kemudian diikuti semakin rapatnya hubungan antar anggota masyarakat. Hal tersebut kan meningkiatkan kerja sama dan munculnya gagasan baru dalam masyarakat. Peningkatan sistem pembagian kerjatersebut berimplikasi pada perubahan tipe solidaritas sosialnya. Tipe solidaritas tersebut ada dua macam, yaitu:

a) Solidaritas mekanik, Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern dan poskolonial bentuk karena

---

<sup>20</sup> L. Layendecker. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. (Jakarta: PT Gramedia. 1983)., hal 178.

saling kesamaan antar anggota masyarakat, suku etnik dan ras. Anggota masyarakat diharapkan mampu mempertahankan kesatuan. Solidaritas yang dibangun karena sebab kesadaran kolektif dan belum mengenal pembagian kerja.

- b) Solidaritas organik, yang terbentuk karena adanya perbedaan antar anggota masyarakat. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan anggota masyarakat saling bergantung satu sama lain dan sudah mengenal pembagian kerja. Mereka bersatu karena adanya perbedaan, Otonomi individu sangat dihargai mengingat setiap individu menjalankan fungsi yang berbeda-beda.<sup>21</sup>

Solidaritas merupakan kunci utama yang dapat mempertahankan keutuhan masyarakat. Masyarakat yang individualis akan sangat mudah dihancurkan oleh masyarakat yang memiliki solidaritas sosial yang sangat kuat. Comte menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh consensus (kesepakatan), sehingga didalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis yang disebut dengan sosiologi statis.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Nanang Martono, *Sosiologi perubahan sosial: perspektif klasik, modern, postmodern dan poskolonial*, (jakarta : PT raja Grafindo, 2012),.Hal, 42-44.

<sup>22</sup> *Ibid.* 33.

### C. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menelaah yang lebih komprehensif, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai relevan terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Maspu pada tahun 2005, fakultas ushuludin, jurusan perbandingan agama, menulis skripsi mengenai *“pluralisme Agama Menurut Nurcholis Majid dan Abdurrahman wahid”*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai pemikiran tentang pluralism agama di Indonesia dari Kedua Tokoh Tersebut.

Penelitian Eka Komariatul Faizah, pada tahun 2013 dalam skripsi *“Pandangan Siswa Terhadap Pluralism KH. Abd, Rahman”* menjelaskan tentang arti pluralisme dalam lingkungan pendidikan siswa, yang didalam lembaga tersebut terdapat bermacam-macam agama dari siswa, yang dianalisis menggunakan pemikiran Kh. Abd rahman Wahid.

Skripsi Muhlisin, Fakultas Ushuludin, Jurusan Perbandingan Agama dengan judul *“Islam Substansial dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”*. Di sini Muhlisin menyoroti pemikiran Abdurrahman Wahid tentang sosial etik, pribumisasi Islam, pluralisme, hubungan antar agama dengan negara. Di sini diungkapkan bahwa sosok Abdurrahman Wahid adalah mempunyai pemikiran pemisahan antara dimensi ritual dan sosial, sangat apresiatif dengan budaya lokal serta tokoh pembaharu dalam

menafsirkan dan membongkar simbol-simbol agama yang mengalami stagnasi tanpa mengubah esensi ajaran agama dan Islam tidak punya konsep kenegaraan yang definitif.

Berbeda dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap pluralisme agama, dan bagaimana masyarakat melestarikan kerukunan sehingga solidaritas antar masyarakat terwujud dengan baik, yang mana penulis menganalisis fenomena tersebut berdasarkan kaca mata teori sosiologi agama, pluralisme yang tidak hanya berpacu pada pendapat KH. Abdur Rahman saja melainkan dari beberapa pendapat.